



Rencana Strategis 2015 - 2019

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan

*Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan
2015 - 2019*



LPMP Sulawesi Selatan

'menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif'

KATA PENGANTAR

LPMP Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan sasaran kerja yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi.

Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2019 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2015 – 2019 khususnya di bidang penjaminan mutu pendidikan. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (2) Rencana/Program kegiatan bidang penjaminan mutu pendidikan; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan penjaminan mutu pendidikan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Strategis juga diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan kebudayaan di bidang penjaminan mutu pendidikan selama lima tahun mendatang.

Makassar, 2016
Kepala LPMP Sulawesi Selatan

Dr. H. Abdul Halim Muharram, M.Pd
NIP 19650715 199403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Paradigma Penjaminan Mutu Pendidikan	4
D. Kondisi Umum	5
E. Potensi dan Permasalahan	19
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN	27
A. Visi LPMP Sulawesi Selatan	27
B. Misi LPMP Sulawesi Selatan	32
C. Tujuan Strategi LPMP Sulawesi Selatan	33
D. Sasaran Kegiatan LPMP Sulawesi Selatan	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	39
B. KERANGKA KELEMBAGAAN	43
BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP SULAWESI SELATAN	45
A. TARGET KINERJA	45
B. PENTAHAPAN KINERJA	48
BAB V PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Kemdikbud menetapkan arah pembangunan pendidikan pada empat periode rencana pembangunan bidang pendidikan jangka menengah. Periode 2005-2009 diarahkan pada peningkatan kapasitas dan modernitas sistem pendidikan. Periode 2010-2014 diarahkan pada peningkatan dan penguatan pelayanan pendidikan pada tingkat nasional. Periode 2015-2019 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat regional. Periode 2020-2024 diarahkan pada penguatan daya saing pada tingkat Internasional.

Sejalan degan amanat Konstitusi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam “Nawa Cita” berkaitan dengan pembangunan bidang pendidikan memberikan perhatian untuk (1) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (2) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; (3) Melakukan revolusi karakter bangsa; (4) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Pengaturan operasional untuk mewujudkan Nawa Cita dan hak memperoleh pendidikan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, dan peraturan turunan lainnya, dalam visi, misi, maupun program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Strategis, dan program Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2015-2019, yang menjadi salah satu komponen penunjang pencapaian visi dan misi Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

LPMP Sulawesi Selatan menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah ke dalam Renstra LPMP. Renstra LPMP disusun berdasarkan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk lebih memantapkan penerapan *performance-based budgeting* sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan program tahunan yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi. Sedangkan rencana operasional digunakan untuk menentukan kegiatan yang lebih rinci yang merupakan bisnis proses dalam menghasilkan output. Selain itu Rencana Strategis juga memuat hal-hal yang terkait dengan perubahan internal yang tertuang di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Perubahan ini terkait adanya proses bisnis internal LPMP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan. Rencana Strategis ini memuat rencana kerja dan sasaran kerja yang lebih operasional, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menentukan ketercapaian sasaran jangka menengah organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;

- h. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019;
- n. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014—2019;
- o. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana StrategisK/L) 2015—2019; dan
- q. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
- r. Permendikbud Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- s. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.

C. PARADIGMA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitas pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Mengingat peningkatan mutu merupakan bagian penting dan strategis bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional, maka LPMP mempunyai keterkaitan dengan unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah maupun dengan Dinas Pendidikan di Propinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan terhadap hal berikut :

1. Core Programme, yaitu kegiatan utama dalam rangka penjaminan mutu pendidikan
2. Extended Programme, yaitu program-program direktorat yang dapat disinkronkan dengan LPMP, antara lain Pendampingan K-13 dan monev, sekolah model/sekolah rujukan/sekolah Pembina, dll
3. Pengembangan kapasitas, yaitu 1). Kapasitas kelembagaan mengkaji ulang kebutuhan gedung disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tugas dan fungsi LPMP, dan 2) Pengembangan kapasitas SDM, dengan melakukan pemetaan kompetensi, peningkatan kompetensi. Pembinaan karir, dan lain sebagainya.

D. KONDISI UMUM

1. DATA SEKOLAH DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data sekolah di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	Total		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	909	442	467
2	Kab. Bone	852	814	38
3	Kab. Gowa	578	508	70
4	Kab. Wajo	501	476	25
5	Kab. Bulukumba	464	442	22
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	429	403	26
7	Kab. Luwu	419	360	59
8	Kab. Pinrang	409	387	22
9	Kab. Jeneponto	402	369	33
10	Kab. Maros	383	306	77
11	Kab. Tana Toraja	349	289	60
12	Kab. Luwu Utara	348	341	7
13	Kab. Soppeng	319	298	21
14	Kab. Takalar	312	292	20
15	Kab. Sidenreng Rappang	311	290	21
16	Kab. Sinjai	307	297	10
17	Kab. Toraja Utara	299	256	43
18	Kab. Enrekang	288	274	14
19	Kab. Barru	253	243	10
20	Kab. Luwu Timur	218	189	29
21	Kab. Kepulauan Selayar	209	202	7
22	Kab. Bantaeng	199	178	21
23	Kota Pare-Pare	134	101	33
24	Kota Palopo	129	91	38
Total	Total	9.021	7.848	1.173

a. JENJANG SD

Gambaran data SD di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	SD		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	490	362	128
2	Kab. Bone	670	665	5
3	Kab. Gowa	411	399	12
4	Kab. Wajo	397	384	13
5	Kab. Bulukumba	349	348	1
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	301	299	2
7	Kab. Luwu	270	255	15
8	Kab. Pinrang	322	315	7
9	Kab. Jeneponto	287	284	3
10	Kab. Maros	260	246	14
11	Kab. Tana Toraja	220	210	10
12	Kab. Luwu Utara	245	245	0
13	Kab. Soppeng	256	254	2
14	Kab. Takalar	236	234	2
15	Kab. Sidenreng Rappang	234	229	5
16	Kab. Sinjai	241	239	2
17	Kab. Toraja Utara	186	179	7
18	Kab. Enrekang	218	217	1
19	Kab. Barru	197	197	0
20	Kab. Luwu Timur	154	144	10
21	Kab. Kepulauan Selayar	139	138	1
22	Kab. Bantaeng	145	143	2
23	Kota Pare-Pare	89	80	9
24	Kota Palopo	76	65	11
Total	Total	6.393	6.131	262

b. JENJANG SMP

Gambaran data SMP di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	SMP		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	204	44	160
2	Kab. Bone	119	110	9
3	Kab. Gowa	107	81	26
4	Kab. Wajo	73	70	3
5	Kab. Bulukumba	71	64	7
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	87	76	11
7	Kab. Luwu	100	75	25
8	Kab. Pinrang	55	51	4
9	Kab. Jeneponto	73	64	9
10	Kab. Maros	72	43	29
11	Kab. Tana Toraja	81	62	19
12	Kab. Luwu Utara	71	69	2
13	Kab. Soppeng	38	31	7
14	Kab. Takalar	43	37	6
15	Kab. Sidenreng Rappang	49	43	6
16	Kab. Sinjai	41	40	1
17	Kab. Toraja Utara	75	64	11
18	Kab. Enrekang	45	40	5
19	Kab. Barru	38	34	4
20	Kab. Luwu Timur	41	30	11
21	Kab. Kepulauan Selayar	50	47	3
22	Kab. Bantaeng	35	24	11
23	Kota Pare-Pare	23	13	10
24	Kota Palopo	22	14	8
Total	Total	1.613	1.226	387

c. JENJANG SMA

Gambaran data SMA di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	SMA		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	126	23	103
2	Kab. Bone	38	30	8
3	Kab. Gowa	43	22	21
4	Kab. Wajo	17	15	2
5	Kab. Bulukumba	22	19	3
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	28	20	8
7	Kab. Luwu	24	18	6
8	Kab. Pinrang	15	11	4
9	Kab. Jeneponto	21	11	10
10	Kab. Maros	30	14	16
11	Kab. Tana Toraja	19	13	6
12	Kab. Luwu Utara	19	19	0
13	Kab. Soppeng	12	8	4
14	Kab. Takalar	22	13	9
15	Kab. Sidenreng Rappang	17	11	6
16	Kab. Sinjai	16	14	2
17	Kab. Toraja Utara	15	8	7
18	Kab. Enrekang	17	12	5
19	Kab. Barru	9	6	3
20	Kab. Luwu Timur	19	13	6
21	Kab. Kepulauan Selayar	11	9	2
22	Kab. Bantaeng	8	6	2
23	Kota Pare-Pare	9	5	4
24	Kota Palopo	12	6	6
Total	Total	569	326	243

d. JENJANG SMK

Gambaran data SMK di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	SMK		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	88	13	75
2	Kab. Bone	23	9	14
3	Kab. Gowa	15	5	10
4	Kab. Wajo	14	7	7
5	Kab. Bulukumba	22	11	11
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	13	8	5
7	Kab. Luwu	23	12	11
8	Kab. Pinrang	17	10	7
9	Kab. Jeneponto	20	10	10
10	Kab. Maros	20	2	18
11	Kab. Tana Toraja	29	4	25
12	Kab. Luwu Utara	12	8	4
13	Kab. Soppeng	12	5	7
14	Kab. Takalar	10	7	3
15	Kab. Sidenreng Rappang	11	7	4
16	Kab. Sinjai	9	4	5
17	Kab. Toraja Utara	23	5	18
18	Kab. Enrekang	8	5	3
19	Kab. Barru	8	5	3
20	Kab. Luwu Timur	4	2	2
21	Kab. Kepulauan Selayar	9	8	1
22	Kab. Bantaeng	11	5	6
23	Kota Pare-Pare	13	3	10
24	Kota Palopo	19	6	13
Total	Total	433	161	272

e. JENJANG SLB

Gambaran data SLB di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	SLB		
		Jml	N	S
1	Kota Makassar	1	0	1
2	Kab. Bone	2	0	2
3	Kab. Gowa	2	1	1
4	Kab. Wajo	0	0	0
5	Kab. Bulukumba	0	0	0
6	Kab. Pangkajene Kepulauan	0	0	0
7	Kab. Luwu	2	0	2
8	Kab. Pinrang	0	0	0
9	Kab. Jeneponto	1	0	1
10	Kab. Maros	1	1	0
11	Kab. Tana Toraja	0	0	0
12	Kab. Luwu Utara	1	0	1
13	Kab. Soppeng	1	0	1
14	Kab. Takalar	1	1	0
15	Kab. Sidenreng Rappang	0	0	0
16	Kab. Sinjai	0	0	0
17	Kab. Toraja Utara	0	0	0
18	Kab. Enrekang	0	0	0
19	Kab. Barru	1	1	0
20	Kab. Luwu Timur	0	0	0
21	Kab. Kepulauan Selayar	0	0	0
22	Kab. Bantaeng	0	0	0
23	Kota Pare-Pare	0	0	0
24	Kota Palopo	0	0	0
Total	Total	13	4	9

2. DATA GURU DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data guru di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

No	Wilayah	Jenjang						Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
1	Kab. Bantaeng	223	2254	507	251	248	14	3497
2	Kab. Barru	312	2099	752	241	166		3570
3	Kab. Bone	1454	5269	1699	888	259	28	9597
4	Kab. Bulukumba	1174	3532	1214	523	351	41	6835
5	Kab. Enrekang	349	2378	753	458	240	13	4191
6	Kab. Gowa	758	4211	1529	668	440	47	7653
7	Kab. Jeneponto	325	3148	992	337	252	8	5062
8	Kab. Selayar	404	1661	691	264	201	21	3242
9	Kab. Luwu	562	3114	1355	592	340	7	5970
10	Kab. Luwu Timur	467	1928	765	499	101	14	3774
11	Kab. Luwu Utara	479	2792	1084	556	253		5164
12	Kab. Maros	353	2584	958	501	188		4584
13	Kab. Pangkep	235	3071	1152	516	321	41	5336
14	Kab. Pinrang	501	3378	1171	394	414	13	5871
15	Kab. Sidrap	528	2324	950	435	276		4513
16	Kab. Sinjai	349	2733	901	543	213	9	4748
17	Kab. Soppeng	307	2573	816	364	339	22	4421
18	Kab. Takalar	542	2707	897	533	302	11	4992
19	Kab. Tana Toraja	182	2108	1020	360	448	32	4150
20	Kab. Toraja Utara	132	2105	1036	328	471	10	4082
21	Kab. Wajo	644	3619	1099	510	228	5	6105
22	Kota Makassar	1543	5997	2972	1900	1434	257	14103
23	Kota Palopo	300	1117	546	392	468	32	2855
24	Kota Parepare	305	1236	554	296	379	12	2782
Total		12428	67938	25413	12349	8332	637	127097

3. DATA PENGAWAS DI PROPINSI SULAWESI SELATAN

Gambaran data pengawasdi Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	PENGAWAS			TOTAL
		SD	SMP	SMA/SMK	
1	Sinjai	22	13	9	44
2	Bantaeng	25	17	11	53
3	Bulukumba	43	46		89
4	Jeneponto	42	11	7	60
5	Takalar	48	19	21	88
6	Pangkep	30	12	11	53
7	Parepare	9	6	8	23
8	Selayar	26	9	6	41
9	Sidrap	33			33
10	Soppeng	42	8	15	65
11	Tana Toraja	22	17	13	52
12	Toraja Utara	26	7	10	43
13	Luwu Utara	38	18	8	64
14	Enrekang	19	5	3	27
15	Barru	19	5		24
16	Pinrang	29	14	16	59
17	Makassar	75	19		94
18	Bone	99	16	18	133
19	Wajo	40	40		80
20	Gowa	35	10	8	53
21	Maros	36	25	5	66
22	Luwu Timur	19	8		27
23	Palopo	7	17		24
24	Luwu	62	13	16	91
Total					1386

4. CAPAIAN SNP

Gambaran capaian SNP satuan pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. JENJANG SD

CAPAIAN SNP JENJANG SD PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2014

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	6.11
2	KAB. BARRU	6.05
3	KAB. BONE	6.05
4	KAB. BULUKUMBA	6.01
5	KAB. ENREKANG	6.05
6	KAB. GOWA	5.96
7	KAB. JENEPONTO	5.07
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	6.2
9	KAB. LUWU	6.15
10	KAB. LUWU TIMUR	7.06
11	KAB. LUWU UTARA	5.5
12	KAB. MAROS	5.93
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	6.37
14	KAB. PINRANG	6.41
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	6.61
16	KAB. SINJAI	6.09
17	KAB. SOPPENG	6.05
18	KAB. TAKALAR	5.47
19	KAB. TANA TORAJA	6.14
20	KAB. TORAJA UTARA	6.02
21	KAB. WAJO	6.03
22	KOTA MAKASAR	5.83
23	KOTA PALOPO	6.34
24	KOTA PARE PARE	6.82
PROPINSI SULAWESI SELATAN		6.09

b. JENJANG SMP

CAPAIAN SNP JENJANG SMP PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2014

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	5.77
2	KAB. BARRU	6.08
3	KAB. BONE	6.2
4	KAB. BULUKUMBA	6.44
5	KAB. ENREKANG	6.59
6	KAB. GOWA	5.76
7	KAB. JENEPONTO	5.44
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	6.08
9	KAB. LUWU	6.02
10	KAB. LUWU TIMUR	6.81
11	KAB. LUWU UTARA	5.74
12	KAB. MAROS	6.21
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	5.86
14	KAB. PINRANG	6.2
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	6.57
16	KAB. SINJAI	6.69
17	KAB. SOPPENG	6.41
18	KAB. TAKALAR	5.75
19	KAB. TANA TORAJA	6.51
20	KAB. TORAJA UTARA	6.3
21	KAB. WAJO	6.06
22	KOTA MAKASAR	6.05
23	KOTA PALOPO	6.53
24	KOTA PARE PARE	6.34
PROPINSI SULAWESI SELATAN		6.18

c. JENJANG SMA

CAPAIAN SNP JENJANG SMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2014

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	6.32
2	KAB. BARRU	5.59
3	KAB. BONE	6.15
4	KAB. BULUKUMBA	6.45
5	KAB. ENREKANG	6.25
6	KAB. GOWA	5.59
7	KAB. JENEPONTO	5.63
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	5.64
9	KAB. LUWU	6.24
10	KAB. LUWU TIMUR	6.45
11	KAB. LUWU UTARA	5.9
12	KAB. MAROS	6.14
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	5.83
14	KAB. PINRANG	6.19
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	6.16
16	KAB. SINJAI	6.39
17	KAB. SOPPENG	6.12
18	KAB. TAKALAR	6.23
19	KAB. TANA TORAJA	6.94
20	KAB. TORAJA UTARA	6.68
21	KAB. WAJO	6.27
22	KOTA MAKASAR	5.79
23	KOTA PALOPO	6.74
24	KOTA PARE PARE	6.38
PROPINSI SULAWESI SELATAN		6.17

d. JENJANG SMK

CAPAIAN SNP JENJANG SMK PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2015

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	6.14
2	KAB. BARRU	5.53
3	KAB. BONE	5.22
4	KAB. BULUKUMBA	6.33
5	KAB. ENREKANG	5.79
6	KAB. GOWA	5.11
7	KAB. JENEPONTO	5.62
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	5.56
9	KAB. LUWU	5.48
10	KAB. LUWU TIMUR	6.09
11	KAB. LUWU UTARA	5.39
12	KAB. MAROS	5.72
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	5.49
14	KAB. PINRANG	5.44
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	5.92
16	KAB. SINJAI	5.97
17	KAB. SOPPENG	5.86
18	KAB. TAKALAR	5.67
19	KAB. TANA TORAJA	5.61
20	KAB. TORAJA UTARA	6.65
21	KAB. WAJO	5.81
22	KOTA MAKASAR	5.5
23	KOTA PALOPO	5.38
24	KOTA PARE PARE	6
PROPINSI SULAWESI SELATAN		5.72

5. CAPAIAN UKG

a. UKG GURU

CAPAIAN UKG GURU PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2012 – 2014

JENJANG	RERATA		
	2012	2013	2014
TK	39.16	46.40	48.43
SD	38.39	41.11	41.84
SMP	44.87	48.76	46.97
SLB	36.56	39.27	35.45
SMA	42.68	50.25	48.63
SMK	45.26	48.50	46.31
PROPINSI SULAWESI SELATAN	41.16	45.71	44.60

b. UKG KEPALA SEKOLAH

CAPAIAN UKG KEPALA SEKOLAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2015

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	43.76
2	KAB. BARRU	41.35
3	KAB. BONE	39.91
4	KAB. BULUKUMBA	43.49
5	KAB. ENREKANG	45.99
6	KAB. GOWA	42.71
7	KAB. JENEPONTO	37.11
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	43.93
9	KAB. LUWU	39.6
10	KAB. LUWU TIMUR	43.85
11	KAB. LUWU UTARA	41.83
12	KAB. MAROS	43.27
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	41.01
14	KAB. PINRANG	41.85
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	41.32
16	KAB. SINJAI	42.26
17	KAB. SOPPENG	43.96
18	KAB. TAKALAR	40.1
19	KAB. TANA TORAJA	43.56
20	KAB. TORAJA UTARA	42.54
21	KAB. WAJO	44.4
22	KOTA MAKASAR	43.4
23	KOTA PALOPO	43.5
24	KOTA PARE PARE	46.13
PROPINSI SULAWESI SELATAN		42.24

c. UKG PENGAWAS SEKOLAH

CAPAIAN UKG PENGAWAS SEKOLAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2015

NO.	KAB/KOTA	RERATA
1	KAB. BANTAENG	41.94
2	KAB. BARRU	37.33
3	KAB. BONE	37.46
4	KAB. BULUKUMBA	39.56
5	KAB. ENREKANG	44.86
6	KAB. GOWA	45.06
7	KAB. JENEPONTO	35.51
8	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	39.22
9	KAB. LUWU	36.72
10	KAB. LUWU TIMUR	41.75
11	KAB. LUWU UTARA	38.64
12	KAB. MAROS	40.41
13	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	40.73
14	KAB. PINRANG	40.46
15	KAB. SIDENRENG RAPPANG	38.45
16	KAB. SINJAI	39.9
17	KAB. SOPPENG	42.04
18	KAB. TAKALAR	34.59
19	KAB. TANA TORAJA	39.5
20	KAB. TORAJA UTARA	36.87
21	KAB. WAJO	40.74
22	KOTA MAKASAR	38.35
23	KOTA PALOPO	40.21
24	KOTA PARE PARE	40.87
PROPINSI SULAWESI SELATAN		37.92

E. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Pusat di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki potensi, yang seyogyanya dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan pendidikan. Perlu dilakukan analisis terhadap potensi yang ada. Tentu juga di samping potensi, tidak pula dapat dipungkiri adanya tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Mengacu kepada Rencana Strategis Dirjen Dikdasmen dan Kemdikbud Tahun 2015 – 2019, beberapa potensi yang bisa menjadi perhatian, adalah

1. Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus, Beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

a. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Angka laju dan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010 – 2014 terbilang cukup baik. Angka itu didukung pula oleh perkembangan diberbagai indikator ekonomi makro. Semakin tumbuh harapan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Posisi tersebut di dapat dari analisis dan perkiraan atas pertumbuhan beberapa indikator utama salah satunya seperti jumlah masyarakat kelas menengah ke atas dari 45 juta orang menjadi 135 juta orang dan meningkatnya kemampuan 74% usia produktif dalam menyumbang 86% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dalam analisis diperkirakan pada tahun 2030, Indonesia akan membutuhkan 113 juta tenaga kerja terampil untuk dapat menjaga kesinambungan kondisi perekonomiannya.

b. Daya Saing Indonesia di Mata Dunia Internasional

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan negara-negara lain.

Sebagaimana ditunjukkan dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*, Indonesia mengalami peningkatan peringkat daya saing dari 55 pada tahun 2009 – 2010 menjadi peringkat 38 pada tahun 2013 – 2014. Seluruh indikator GCI Indonesia menunjukkan peningkatan sehingga saat ini Indonesia masuk pada tahapan transisi dari negara dengan kategori *efficiency driven economy* menjadi negara dengan kategori *innovation driven* yang merupakan kelompok negara-negara maju. Ditinjau dari pencapaian *Human Development Index (HDI)* Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari nomor 128 menjadi 124 dari 185 negara.

c. Perkembangan Demografi di Indonesia

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati “bonus demografi”, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk nonusia kerja menjadi penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas manusia (*human capital*). Di Indonesia, rasio ketergantungan telah menurun dan melewati batas di bawah 50 persen pada tahun 2012 dan mencapai titik terendah sebesar 46.9 persen antara tahun 2028 – 2031. Indonesia mempunyai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi secara nasional maupun regional. Penduduk usia produktif Indonesia sendiri menyumbang sekitar 38 persen dari total penduduk usia produktif di ASEAN. Tingginya jumlah dan proporsi penduduk usia kerja Indonesia, selain meningkatkan angkatan kerja dalam negeri, juga membuka peluang untuk mengisi kebutuhan tenaga bagi negara-negara yang proporsi penduduk usia kerjanya menurun seperti Singapura, Korea, Jepang dan Australia.

Di sisi lain, bonus demografi hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh Indonesia apabila ada jaminan bahwa sebagian atau seluruh penduduk usia kerja tersebut produktif atau memiliki pekerjaan. Keterbatasan lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja penduduk usia kerja

berdampak pada pengangguran. Hal ini akan menjadi “bencana demografi” karena tingkat ketergantungan yang justru meningkat drastis akibat tidak mampu membiayai dirinya sendiri.

d. Spektrum Tenaga Kerja di Indonesia

Sebagai catatan pada tahun 2013 menurut data BPS, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja 65.70% hanya memiliki latar belakang pendidikan dasar (SD/SMP), 24.51% lulusan pendidikan menengah, dan 9.79% lulusan pendidikan tinggi. Pemerintah mempunyai pekerjaan yang sangat besar mengingat tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil dan inovatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

e. Perkembangan Kondisi Sosial Masyarakat

Sebagian kondisi sosial masyarakat, yang tergambar dalam dinamika berbangsa bernegara serta hubungan sosial, menunjukkan kondisi yang agak mengkhawatirkan. Salah satu diantaranya berkaitan dengan permasalahan korupsi yang terjadi dan meibatkan banyak pejabat negara (dalam CPI tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 177 negara), rendahnya toleransi antaraumat beragama, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi yang sudah merambah pada anak-anak kecil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rendahnya kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan, rendahnya sportivitas dalam berkompetisi, dan banyaknya kejadian negatif lainnya yang menjadi rangkaian fenomena dan realitas yang dihadapi oleh generasi muda saat ini.

Generasi muda terindikasi mengalami kesulitan untuk mencari contoh-contoh yang dapat dijadikan panutan (*role model*) dalam membangun karakter diri. Padahal karakter tersebut amat dibutuhkan untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan berdaulat di dalam dan di luar negeri. Namun, sebagian masyarakat sudah sangat menyadari permasalahan ini, sehingga cukup banyak orang tua yang berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi panutan. Negara harus

memfasilitasi mereka yang telah menyadari hal ini, serta berupaya meningkatkan kesadaran mereka yang belum menyadari hal tersebut.

f. Kondisi Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan bergotong royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian personal maupun komunal, yang membentuk jati diri bangsa. Namun, perkembangan terkini dari kehidupan sosial masyarakat mengindikasikan adanya pelemahan jati diri tersebut. Sebagian nilai mulia bangsa Indonesia kurang tampak dalam kehidupan personal dan komunal. Bahkan, sebagian pihak sudah khawatir bahwa nilai tersebut tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang ideal atau menjadi pedoman hidup.

Peran bahasa dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta penerapan nilai-nilai budaya

2. Potensi Penjaminan Mutu Pendidikan

Potensi peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan melalui LPMP dikelola dengan mengacu pada target kinerja, sebagai berikut :

Target Kinerja Kegiatan LPMP Tahun 2015 – 2019

No.	Target	Satuan	Target Sasaran				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SD	%	16.8	25.0	40.0	60.0	80.0
2.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMP	%	16.8	25.0	40.0	60.0	80.0
3.	Supervisi dan Fasilitasi	%	16.8	25.0	40.0	60.0	80.0

	pencapaian SNP SMA						
4.	Supervisi dan Fasilitasi pencapaian SNP SMK	%	16.8	25.0	40.0	60.0	80.0

3. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Melihat dari perencanaan, program dan keberhasilan yang dicapai dalam pembangunan pendidikan dasar dan menengah sampai tahun 2014 (akhir Renstra 2010 – 2014) menunjukkan prestasi yang baik. Dari segi pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan, Kemdikbud memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun masih terdapat permasalahan penting dan tantangan yang harus dihadapi pada periode tahun 2015-2019. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diuraikan pada bagian berikut ini.

a. **Peran Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal**

Meskipun sebagian pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di era sebelumnya, namun sebagian yang lain masih perlu upaya penguatan peran dan keterlibatan di dalam meningkatkan kualitas layanan dan mutu pendidikan. Peran orang tua dalam mendukung kemajuan pendidikan anak masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja. Satuan pendidikan hendaknya menempatkan siswa sebagai subjek pendidikan agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikan sebagai fasilitator yang memiliki kemampuan pengelolaan kelas yang baik. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

b. **Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun**

Wajib belajar pendidikan 12 tahun bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia usia s.d. 21 tahun. Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12

Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan, seperti masih ada anak-anak usia pendidikan dasar dan menengah yang belum mendapat pelayanan pendidikan, masih ada anak-anak yang mengalami putus sekolah. Permasalahan itu harus segera diatasi agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

- c. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal

Meskipun capaian APK pendidikan dasar pada tahun 2014 telah di atas 100%, masih ada permasalahan dari segi pemerataan baik sisi spasial maupun tingkat ekonomi. Pada jenjang SD/MI ada 6 kabupaten yang APK-nya masih di bawah 75%, sebanyak 29 kabupaten mempunyai APK 75-95%. Di jenjang SMP/MT, terdapat 28 kabupaten yang APK-nya di bawah 75%, dan 85 kabupaten/kota APK-nya antara 75-95%

- d. Belum seluruh penduduk memperoleh layanan akses pendidikan menengah yang berkualitas

Belum semua anak usia 16-18 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana ditunjukkan pada Capaian APK SMA/MA/SMK yang masih rendah yaitu sebesar 80% pada tahun 2014. Masih banyaknya kecamatan yang belum memiliki SMA/MA/SMK menjadi penyebab kantung-kantung putus sekolah belum tersentuh atau terlayani secara baik. Saat ini 13.9% kecamatan belum memiliki SMA/MA/SMK. Demikian pula perbedaan kemampuan melanjutkan sekolah antarkemampuan ekonomi sangat tinggi serta keterbatasan fisik masih menjadi kendala.

- e. Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja belum maksimal

Hasil layanan pendidikan SMK belum seperti yang diharapkan, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat pengangguran lulusan SMK yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA yaitu 9.10% untuk SMA dan 7.21% untuk SMK pada bulan Februari tahun 2014. Selain itu, juga karena jumlah rata-rata penghasilan yang tidak terlalu berbeda antara lulusan SMA dan SMK. Hal ini menunjukkan belum signifikannya persepsi dunia kerja antara lulusan SMK dan SMA. Ketidakselarasan antara tuntutan dunia kerja dengan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja.

4. Permasalahan Penjaminan Mutu Pendidikan

Dalam upaya penguatan jaminan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas daerah, pemberdayaan LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Berbagai permasalahan di tingkat satuan pendidikan menengah seperti pelaksanaan kurikulum, proses pembelajaran di kelas, kerjasama guru, siswa, orang tua, dan masyarakat lainnya perlu ditumbuhkan melalui lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengendalian mutu untuk menuju lembaga sekolah yang kredibel. Pemetaan mutu sekolah dan melihat efektivitas sekolah dapat dijadikan sebagai masukan dalam memberikan intervensi kepada satuan pendidikan dalam menyongsong masyarakat ekonomi asia dan meningkatkan daya saing regional.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP SULAWESI SELATAN

A. Visi LPMP Sulawesi Selatan

Pembangunan Indonesia pada masa depan bersandar pada visi Indonesia jangka panjang, yaitu terwujudnya negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia modern yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemerdekaan, dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Insan cerdas dan insan kompetitif melandasi penetapan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sebagaimana tercantum di dalam Rencana Strategis 2015-2019, yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***. Mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan visi yang akan diemban tersebut, ditetapkanlah Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”***

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melandasi visi LPMP Sulawesi Selatan sebagai berikut ***“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkarakter dengan berlandaskan Gotong Royong”***.

Beberapa hal yang perlu diperjelas dalam visi tersebut, yaitu ekosistem dan gotong royong agar tidak menimbulkan beragam tafsir.

Ekosistem dimaksud dalam visi adalah sebagai berikut :

1. Sekolah yang Kondusif

Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagimanusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai juga menjadi factor pendukung.

Faktor pendukung lain yang penting ialah peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Guru sebagai Penyemangat

Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogic, professional, social, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus punya naluri yang sensitive terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar.

3. Orangtua yang terlibat aktif

Orang tua berperan sejak awal sebagai pendidik bagi anak-anaknya sejak masa sebelum dan sesudah mereka bersekolah. Keluarga sebagai lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi, seperti : membentuk kepribadian anak, melaksanakan pendidikan anak di rumah dan mendukung pendidikan di sekolah. Pemerintah memang memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik bagi seluruh anak Indonesia. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, serta memberikan masukan kepada sekolah. Orang tua yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif.

4. Masyarakat yang Sangat Peduli

Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan partisipasi dan kepedulian masyarakat. Salah satu alasannya ialah keterbatasan sumber daya pemerintah. Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan mandiri harus berupaya sebaik-baiknya dan tetap mematuhi semua pedoman, aturan, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan fikiran. Kini masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah.

5. Industri yang Berperan Penting

Di Negara-negara maju, peran industry ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan financial untuk penelitian dan beasiswa. Bahkan di beberapa Negara peran industry menjadi kewajiban sesuai undang-undang yang mengaturnya.

Pengalaman Negara-negara tersebut dapat menjadi pelajaran bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selain dukungan financial, peran industry yang penting ialah menyelesaikan permasalahan peralihan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar

Standar moral yang menjadi prinsip kinerja seluruh warga LPMP Sulawesi Selatan berpatokan pada tata nilai sebagai berikut

Tabel 1.1 Tata Nilai LPMP Sulawesi Selatan



Nilai masukan yang tepat akan mengantisipasi karakteristik pegawai LPMP Sulawesi Selatan, yang selanjutnya akan menjalankan Nilai Proses Manajemen Organisasi dengan baik untuk meningkatkan mutu interaksi antar manusia dalam struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan, sehingga menghasilkan Nilai Keluaran yang akan memfokuskan LPMP Sulawesi Selatan kepada hal-hal yang diharapkan dalam pencapaian visi dan misi dengan baik. Nilai-nilai masukan (*input values*), yakni nilai-nilai yang dibutuhkan dalam diri setiap pegawai LPMP Sulawesi Selatan dalam rangka mencapai keunggulan, meliputi seperti pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Nilai Masukan

Komponen	Pengertian
Empati	Dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain
Beriman dan Bertaqwa	Pekerjaan menjadi suatu amanah dan ibadah, mempunyai moral dan etika, berbudi luhur, dan bermartabat
Tanggap dan Peduli/Responsif	Cepat bertindak/cekatan, bermotivasi, melakukan tindakan berdasarkan azas manfaat, futuristik, adaptif

Komponen	Pengertian
Integritas	Jujur dan dapat dipercaya, berwibawa, karismatik, inspiratif, teladan, sabar, bertanggung jawab dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak
Reliable/Terpercaya	Inovatif dan kreatif, cermat dan teliti, memilikisifat <i>objective</i> dan disiplin
Entrepreneurship	Visioner, intuitif, berhasil guna, berani mengambil resiko dan mengoptimalkan sumber daya yang ada

Nilai-nilai proses (*process values*), yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di LPMP Sulawesi Selatan, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan, meliputi :

Tabel 1.3 Nilai Proses

Komponen	Pengertian
Taat Azas	Prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan/tugas
Kondusif	Memiliki budaya kerja yang sehat dan mandiri, transparan, komunikatif, demokratis, <i>team work</i> , <i>shared vision</i> , <i>self-belonging</i> dan loyalitas
Kompeten	Bekerja berdasarkan keahlian (<i>the right man in the right place</i>)
Perbaikan Berkelanjutan	Terus melakukan perbaikan standar dan mengikuti kecenderungan/tren perubahan sains dan teknologi
Sistematis	Runut (berurutan), efektif, efisien, dan tersistem
Kolaborasi	Membangun kemitraan dan kerja sama

Nilai-nilai keluaran (*output values*), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para *stakeholders* (Unit Utama Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Pemerintah Daerah, DPRD, Pegawai, Donatur, Dunia Pendidikan, Masyarakat lainnya), meliputi :

Tabel 1.4 Nilai Keluaran

Komponen	Pengertian
Akuntabilitas	Dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif
Tata Kelola	Tertib administrasi/sesuai dengan prosedur dan peraturan
Pencitraan Publik	Transparan, komunikatif dan terpercaya
Pelayanan Prima	Handal dan mampu menjadi <i>one-stop service</i>
Profesional	Menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dalam arti berkompetensi, menjadi teladan, terpercaya, sistematis .

7. Standar Kinerja

Standar kinerja yang dimaksudkan dalam visi LPMP Sulawesi Selatan merupakan acuan yang diperlukan oleh setiap pegawai LPMP Sulawesi Selatan sesuai dengan sasaran kerja yang direncanakan menurut peta jabatan dalam setiap unit kerja di LPMP Sulawesi Selatan.

8. Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan

Aktifitas Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 dan diperbaharui kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk mendorong satuan pendidikan dalam upaya pencapaian atau pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.

Aktifitas penjaminan mutu pendidikan yang dimaksudkan terintegrasi dalam proses bisnis penjaminan mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan Pemetaan Mutu Pendidikan, Supervisi Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Pendidikan dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan yang didukung oleh Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Mutu Pendidikan.

B. Misi LPMP Sulawesi Selatan

Dalam rangka mencapai visi ini, ada 4 (empat) misi yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan dalam rentang waktu 2015-2019, yaitu:

Tabel 1.5 Misi LPMP Sulawesi Selatan

Kode	Misi
M1	Mewujudkan Pelaku Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berstandar Moral dan Berkinerja Tinggi
M2	Meningkatkan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Meningkatkan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk menuju pendidikan dasar dan menengah yang berbudaya mutu
M4	Meningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

C. Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan

Tujuan strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan strategis tersebut adalah :

Tabel 1.6 : Tujuan Strategis LPMP Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan
T.2	Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil
T.3	Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi

T.4	Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan
-----	---

Tujuan strategis ini untuk memastikan satuan pendidikan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu melalui penerapan penjaminan mutu di satuan pendidikan tanpa ada diskriminasi akses dan geografis. Kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2015-2019 diarahkan untuk mencapai tujuan strategis ini. Penjabaran dari tujuan strategis tersebut adalah :

1. Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah, Guru dan Siswa dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan.

Peran LPMP Sulawesi Selatan sebagai unit pelaksana teknis kementerian yang bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Peran strategis Pengawas mewakili dinas pendidikan perlu dikuatkan melalui berbagai kegiatan untuk memastikan kapasitas pengawas meningkat dalam mendampingi sekolah binaannya melaksanakan proses penjaminan mutu. Kepala sekolah dan guru merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Sulawesi Selatan selama tahun 2015-2019 akan bermuara pada aktifitas penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan pelaku utamanya adalah kepala sekolah dan guru.

2. Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil.

Sejalan dengan “Nawa Cita” kabinet kerja yang merupakan arah prioritas kebijakan pembangunan pada poin ketiga untuk membangun Indonesia dari

pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan maka LPMP Sulawesi Selatan bertujuan untuk memprioritaskan daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjadi sasaran program dan kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Sehingga pemerataan kualitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan sesuai tujuan direktorat Dikdasmen akan menjadi keniscayaan di provinsi Sulawesi Selatan.

3. Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi

Layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh LPMP Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2015-2019 difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan. Standar moral dan kinerja yang dimiliki oleh seluruh pegawai LPMP menjadi modal dasar bagi LPMP Sulawesi Selatan untuk memberikan layanan yang terbaik sesuai standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan atas layanan penjaminan mutu pendidikan.

4. Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk menjaga agar, (a) mutu laporan keuangan tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (b) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat provinsi.

Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

D. SASARAN KEGIATAN LPMP SULAWESI SELATAN

Untuk mengetahui ketercapaian masing-masing tujuan strategis yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran strategis kegiatan yang harus dicapai sampai tahun 2019 dari setiap tujuan strategis tersebut, sehingga menjadi target yang harus dicapai dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah selama 5 tahun kedepan. Pada setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Adapun sasaran kegiatan LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan.

Melalui tujuan strategis ini diharapkan Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dapat berperan maksimal dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. Layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Sulawesi Selatan terwujud dalam kegiatan pemetaan mutu pendidikan, supervisi dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan. Indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah **90 % Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang disupervisi dan fasilitasi dari sekolah sasaran penjaminan mutu.**

2. Tujuan Strategis Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil.

Pemetaan mutu, supervisi dalam pencapaian standar nasional dan fasilitasi dalam rangka peningkatan mutu yang dilaksanakan oleh LPMP Sulawesi Selatan pada satuan pendidikan termasuk satuan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat mewujudkan adanya pemerataan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan. Peningkatan jumlah satuan pendidikan menjadi target yang harus dipenuhi sesuai target kinerja kegiatan LPMP Sulawesi Selatan. Indikator keberhasilan dari sasaran kegiatan ini adalah **80% satuan pendidikan di setiap jenjang telah dilakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.**

3. Tujuan Strategis Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi

Melalui tujuan strategis ini diharapkan selama tahun 2015-2019 diharapkan seluruh pegawai LPMP Sulawesi Selatan dengan standar moral dan standar kinerja yang tinggi diharapkan dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang menitik beratkan pada kepuasan pelanggan. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah **Indeks kepuasan pengguna layanan penjaminan mutu pendidikan mencapai 85 %.**

4. Tujuan Strategis Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan diharapkan dapat mewujudkan birokrasi LPMP Sulawesi Selatan yang dapat menjadi

teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. *Performace* atau kinerja pengelola kegiatan menjadi sangat penting bagi terciptanya tata kelola yang diinginkan tersebut. Indikator keberhasilan ditetapkan dengan **Tercapainya hasil audit “Wajar Tanpa Pengecualian”**.

Tabel berikut ini menunjukkan kaitan antara tujuan strategis, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Melalui tabel tersebut terlihat IKK yang merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan.

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Penguatan Peran Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di satuan pendidikan	Peningkatan supervisi dan fasilitasi terhadap Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru	90 % Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru yang disupervisi dan fasilitasi dari sekolah sasaran penjaminan mutu
2	Peningkatan Akses Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang Menyentuh daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil	Peningkatan jumlah satuan pendidikan yang dilakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.	80% satuan pendidikan di setiap jenjang telah dilakukan pemetaan, supervisi dan fasilitasi.
3	Peningkatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan kinerja tinggi (T3)	Peningkatan indeks kepuasan atas layanan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.	Indeks kepuasan pengguna layanan penjaminan mutu pendidikan mencapai 85 % .

No	Tujuan Strategis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
4	Peningkatkan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (T4)	Penurunan kuantitas dan kualitas temuan audit internal maupun eksternal	Tercapainya hasil audit “Wajar Tanpa Pengecualian”

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Tujuan strategis yang menjadi acuan arah seluruh aktifitas kelembagaan di LPMP Sulawesi Selatan perlu didukung oleh kebijakan dan strategi yang relevan untuk pencapaian target kinerja. Arah kebijakan LPMP Sulawesi Selatan sesuai tugas pokok dan fungsinya diturunkan dari arah kebijakan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. Tabel berikut ini akan menunjukkan arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan dalam pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan LPMP Sulawesi Selatan.

ARAH KEBIJAKAN DITJEN DIKDASMEN	ARAH KEBIJAKAN LPMP SULAWESI SELATAN	STRATEGI
Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan Pendidikan Dasar dan Menengah berkualitas	Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh satuan pendidikan dalam mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan teknis dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kepastian layanan penjaminan mutu pendidikan dengan penguatan kapasitas internal personal LPMP Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan. b. Meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. c. Memprioritaskan satuan pendidikan di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal di wilayah provinsi

		Sulawesi Selatan sebagai sasaran program dan kegiatan.
Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa	Mendorong tumbuhnya budaya mutu di satuan pendidikan melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. b. Meningkatkan kapasitas pengawas untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
Memperkuat jaminan kualitas (<i>quality assurance</i>) pelayanan pendidikan	Memperkuat penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan. b. Penguatan kapasitas guru dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan.
Mengembangkan kurikulum	Melakukan supervisi penerapan kurikulum sebagai bagian integral dari penerapan penjaminan mutu pendidikan dalam upaya pemenuhan standar nasional pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan integrasi proses pendampingan penerapan kurikulum dalam kerangka penjaminan mutu pendidikan
Memperkuat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Memperkuat capaian standar pengelolaan dengan penguatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penguatan kapasitas personal LPMP Sulawesi

	manajemen berbasis sekolah melalui penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan	<p>Selatan untuk melakukan pendampingan penerapan MBS sebagai bagian dari pendampingan penjaminan mutu pendidikan.</p> <p>b. Penguatan kapasitas kepala sekolah dalam penerapan MBS melalui supervisi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.</p>
Memperkuat sistem informasi pendidikan	Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan.	<p>a. Melakukan pengelolaan data dan informasi mutu pendidikan untuk kebutuhan penjaminan mutu pendidikan.</p> <p>b. Mengembangkan sistem informasi untuk meningkatkan akses layanan data mutu pendidikan.</p> <p>c. Melakukan publikasi hasil pemetaan mutu pendidikan secara berkala dalam sistem informasi mutu pendidikan.</p>

Penerapan strategi yang ditetapkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan tidak terlepas dari tata nilai yang menjadi standar moral dan kinerja pegawai LPMP Sulawesi Selatan dalam memberikan layanan prima penjaminan mutu pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan untuk pemenuhan visi sesuai misi yang diemban akan diwujudkan dalam kerangka kelembagaan yang kuat dan sistematis.

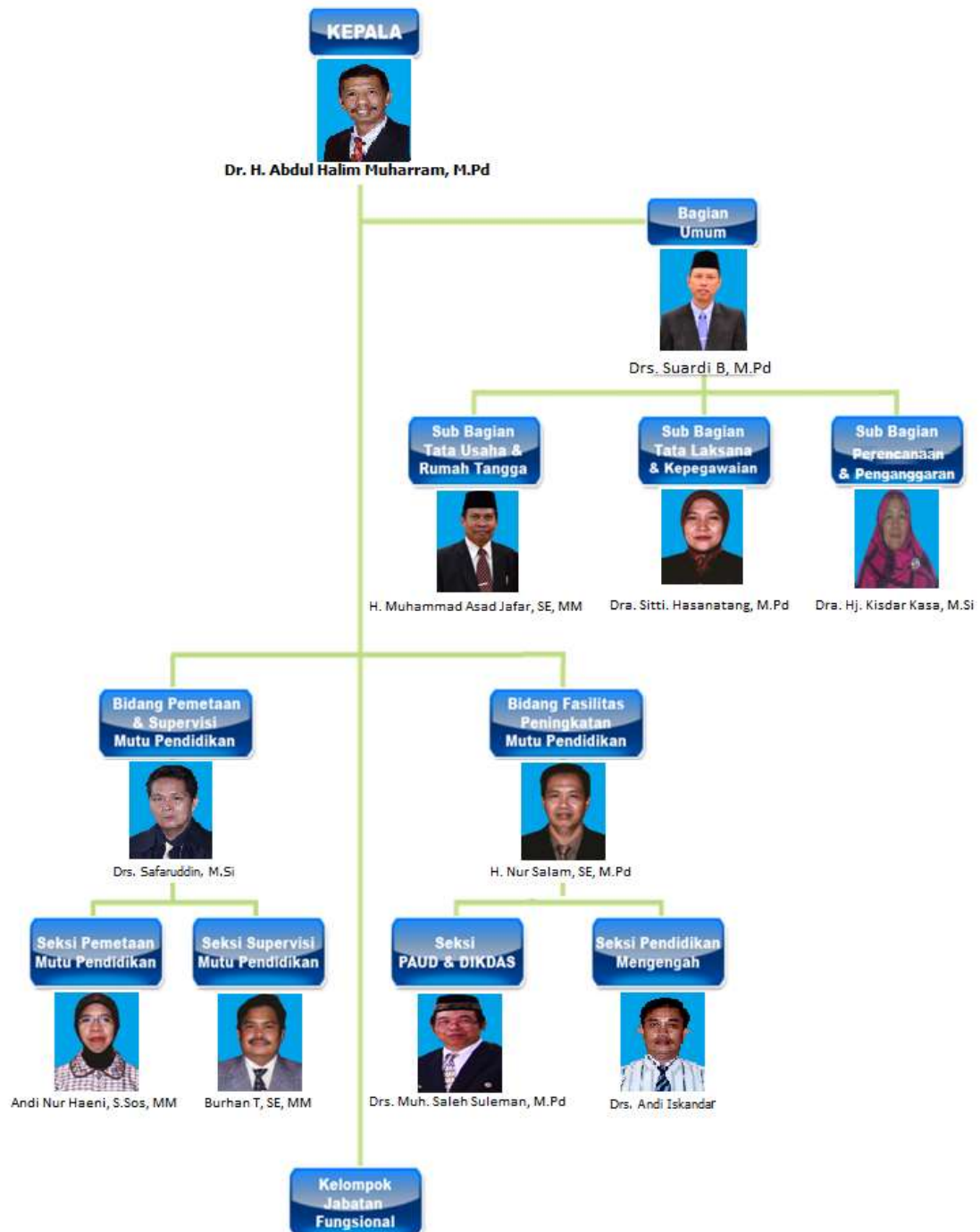
B. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat LPMP Sulawesi Selatan yang meliputi struktur organisasi dan proses bisnis yang menggambarkan alur aktifitas LPMP Sulawesi Selatan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Kerangka kelembagaan ini disusun dengan tujuan :

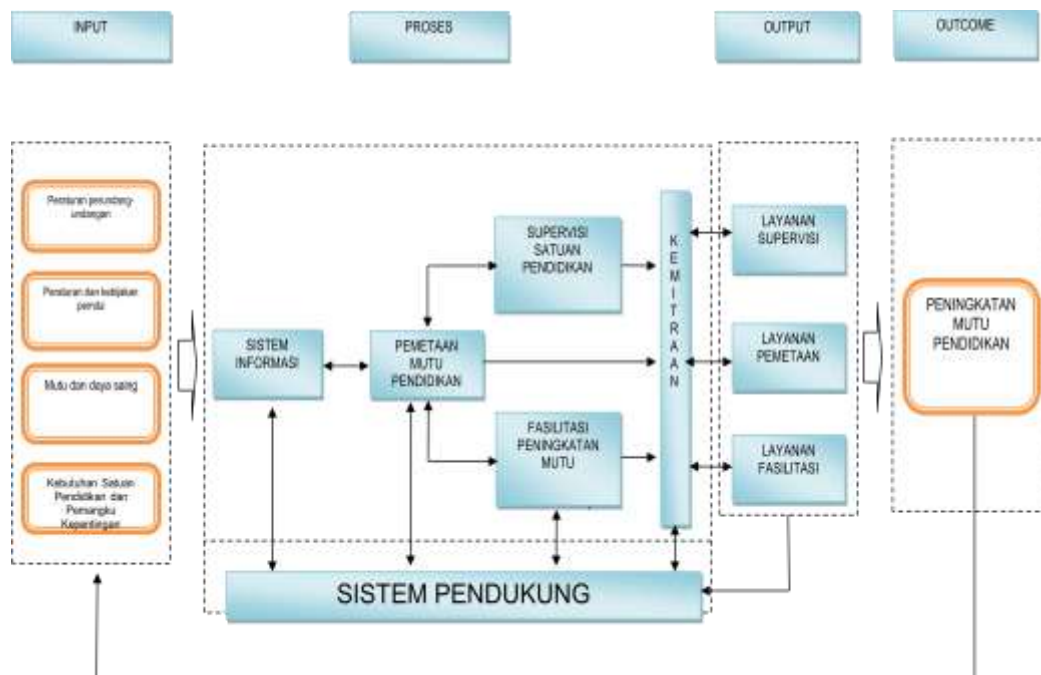
1. meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pencapaian dan visi/misi LPMP Sulawesi Selatan.;
2. membangun sistem internal yang dapat menjamin keterlaksanaan setiap program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya LPMP Sulawesi Selatan.

Pada periode pembangunan 2015—2019, LPMP Sulawesi Selatan akan melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Tengah, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan.

Struktur organisasi LPMP Sulawesi Selatan 2015—2019 ditunjukkan pada gambar berikut:



Proses bisnis yang akan dilaksanakan LPMP Sulawesi Selatan dalam aktifitas penjaminan mutu pendidikan ditetapkan sebagai berikut :



BAB IV TARGET DAN INDIKATOR KINERJA LPMP SULAWESI SELATAN

A. TARGET KINERJA

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan 8 (delapan) sasaran program untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberhasilan Sasaran Program tersebut ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja LPMP Sulawesi Selatan mengacu pada target capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Dikdasmen yang secara eksplisit dilegalkan dalam Permendikbud 28 tahun 2015 tentang Rencana Starategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Target kinerja LPMP Sulawesi Selatan sesuai yang diamanahkan dalam bentuk ketercapaian indikator kinerja kegiatan sesuai indikator kinerja program Direktorat Dikdasmen sebagai berikut :

Kode	IKK	SAT UAN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
SK .3.4002 .2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
IKK.3.4 002.2.1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	90.15	90.15	100	100	100	100
IKK.3.4 002.2.2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	5	15	40	75	95

Kode	IKK	SAT UAN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK.3.4 002.2.3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48	71.49	100	100	100	100
IKK.3.4 002.2.4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
IKK.3.4 002.2.5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41	71.41	100	100	100	100
IKK.3.4 002.2.5	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
IKK.3.4 002.2.6	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.60	59.60	65	80	90	100
IKK.3.4 002.2.7	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	10	25	1	70	95
IKK.3.4 002.2.1 1	Jumlah Dewan Pendidikan yang terbina	dewan pendidikan	0	0	16	16	16	16
SK .3.4005 .1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
IKK.3.4 005.1.1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
IKK.3.4 005.1.2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80

Kode	IKK	SAT UAN	KOND ISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK.3.4 005.1.2	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
IKK.3.4 005.1.2	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80

B. PENTAHAPAN KINERJA

Berdasarkan capaian kinerja sampai tahun 2014, pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja. Berdasarkan ketentuan tersebut LPMP Sulawesi Selatan menyusun pentahapan capaian kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Kode	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
SK .3.4002. 2	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
IKK.3.40 02.2.1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	%	90.15	90.15	100	100	100	100
			4149	4149	4602	4602	4602	4602
IKK.3.40 02.2.2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	5	15	40	75	95
		SD		231	691	1841	3452	4372
IKK.3.40 02.2.3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	%	71.48	71.49	100	100	100	100
		SMP	903	903	1262	1262	1262	1262

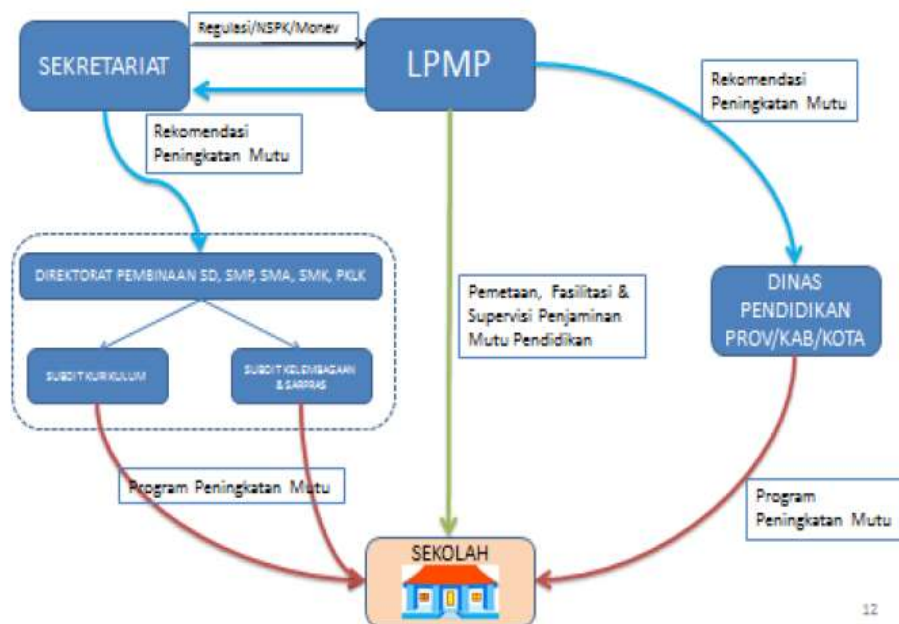
Kode	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
IKK.3.40 02.2.4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
		SMP		253	442	758	1010	1199
IKK.3.40 02.2.5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	%	71.41	71.41	100	100	100	100
		SMA	329	329	460	460	460	460
IKK.3.40 02.2.5	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	20	35	60	80	95
		SMA	0	92	161	276	368	437
IKK.3.40 02.2.6	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	%	59.60	59.60	65	80	90	100
		SMK	231	231	251	309	348	386
IKK.3.40 02.2.7	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	%	0	10	25	1	70	95
		SMK	0	39	97	174	271	367
IKK.3.40 02.2.11	Jumlah Dewan Pendidikan yang terbina	dewan pendidikan	0	0	16	16	16	16
SK .3.4005.1	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan							
IKK.3.40 05.1.1	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
		SD	0	774	1151	1841	2762	3682
IKK.3.40 05.1.2	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80

Kode	IKK	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				
				2015	2016	2017	2018	2019
		SMP	0	212	316	505	758	1010
IKK.3.40 05.1.2	Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
		SMA		78	115	184	276	368
IKK.3.40 05.1.2	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	%	0	16.8	25	40	60	80
		SMK		65	97	155	232	309

LPMP memiliki tugas untuk mengawal keberhasilan pemerintah dalam membangun sektor pendidikan terutama dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kegiatan ini diharapkan memberikan profil satuan pendidikan pada masing-masing daerah terhadap pemenuhan 8 standar pendidikan. Fasilitasi pemenuhan SNP perlu dilakukan agar arah peningkatan kualitas pendidikan dan layanan pendidikan tidak menyimpang dari target tersebut.

Secara struktur sistem dan koordinasi kelembagaan penjaminan mutu pendidikan dapat dilihat pada skema berikut:

KOORDINASI KELEMBAGAAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



12

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dijabarkan atau dilakukan pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yaitu, tahun 2015 sampai 2019.

Di dalam Rencana Strategis secara sistematis diuraikan mengenai tujuan strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang semuanya bermuara kepada pencapaian visi sebagai amanat yang harus diemban oleh LPMP Sulawesi Selatan pada kurun waktu 2015-2019. Secara operasional kegiatan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dibagi ke dalam kegiatan-kegiatan (1) Pemetaan mutu pendidikan; (2) Supervisi dalam pencapaian standar nasional pendidikan; (3) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan; yang terintegrasi dalam satu sistem informasi yang dikelola dan dikembangkan dalam pemberian layanan penjaminan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan LPMP Sulawesi Selatan harus tetap terarah dan terencana, baik dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, serta tetap efisien dalam pelaksanaannya baik dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun aspek realisasi anggaran. Hak terhadap pelayanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas harus dipenuhi. Kualitas layanan penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan perlu diupayakan dengan optimal. Rencana strategis LPMP Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arah pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan kelembagaan di LPMP Sulawesi Selatan untuk memastikan arah kegiatan dan kebijakan pengelolaan LPMP Sulawesi Selatan selaras dengan arah kebijakan

dan pengelolaan direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah
kementerian pendidikan dan kebudayaan.